

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tamban Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tamban :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pada awalnya Tamban merupakan wilayah berstatus Kawedanan dan areal hutan gambut yang kurang dimanfaatkan, sehingga pada zaman penjajahan [Belanda](#) tepatnya Tahun [1937](#) dilakukan perpindahan penduduk ([Transmigrasi](#)) dari pulau [Jawa](#) ke pulau [Kalimantan](#). Pada era tersebut sebanyak 115 kepala keluarga (KK) yang berasal dari [Jawa Timur](#) dipindahkan ke Purwosari 1 km.6 yang sekarang dikenal dengan

Kecamatan Tamban. Pembukaan lahan gambut ini dilakukan dengan membuat saluran kanal yang menghubungkan sungai Kapuas Murung dengan [sungai Barito](#). Pengembangan lahan gambut ini secara besar-besaran dimulai pada tahun 1969 – 1970 yang dikenal dengan proyek pembukaan persawahan pasang surut (P4S). Pada tahun 2000 an, wilayah Kecamatan Tamban ingin memisahkan diri dari kabupaten Barito Kuala dan membentuk kabupaten baru yaitu [Bantam Raya](#). Kecamatan Tamban pada tahun 1980 an terkenal dengan industri Kayu lapis sampai dengan pertengahan tahun 2005. terdapat 6 perusahaan Kayu lapis di sepanjang [Sungai Barito](#) terbanyak di [Barito Kuala](#), seperti Daya Sakti Unggul Corporation (DSUC), Barito Pasifik Timber Group (BPTG) Dll. Namun, karena bahan baku kayu semakin langka, akhirnya perusahaan banyak yang gulung tikar. Luas wilayah Kecamatan Tamban adalah 164,50 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 desa .

Adapun letak wilayah Kecamatan Tamban berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mekarsari dan Anjir Muara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabunganen
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Barito Alalak dan Kota Banjarmasin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mekarsari dan Kabupaten Kapuas.

Kantor Kecamatan Tamban Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

### **1.2.1 TUGAS**

Tugas Kecamatan Tamban yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.2.2 FUNGSI**

Fungsi Kecamatan Tamban adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

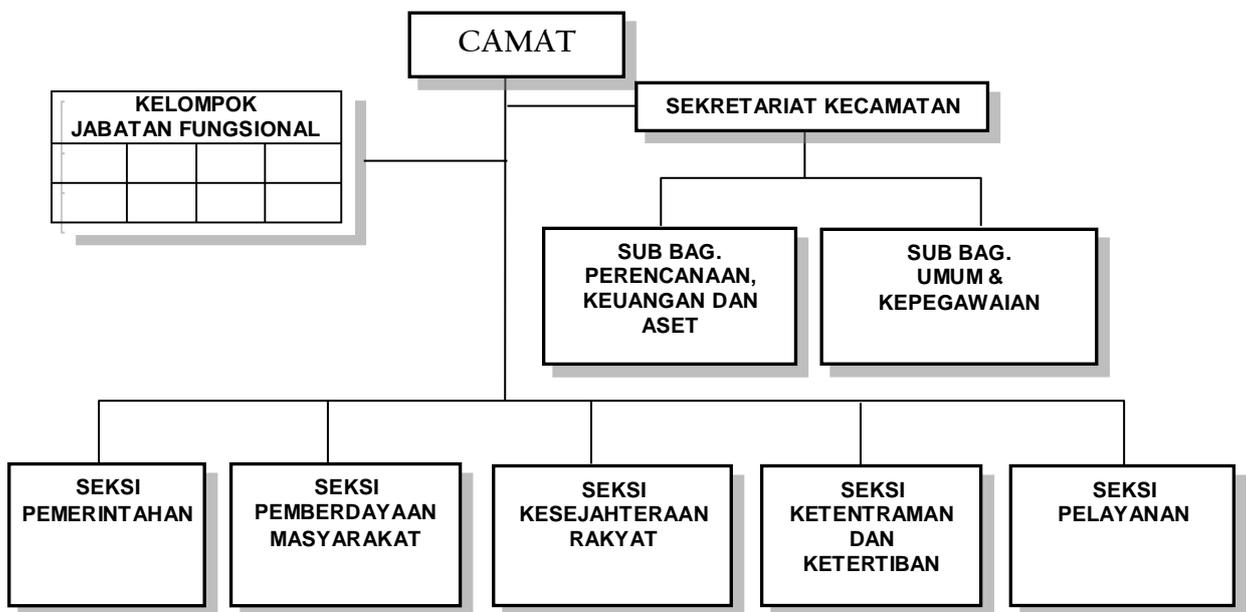
### **STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan kepegawaian Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tamban sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Tamban**



### 1.3 ISU STRATEGIS

#### 1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Tamban permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut .:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

#### **1.4 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### **1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tamban ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tamban Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarakan pada dokumen perencanaan.

## BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarakan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

## BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tamban tahun 2019 dan upaya/langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Kecamatan Tamban pusat pemerintahan berada di desa purwosari I lebih dari 68 km dari ibukota kabupaten barito kuala marabahan jarak dari kota banjarmasi lewat penyeberangan ferry 13 km mayoritas penduduknya petani dan berkebun di wilayah Kecamatan Tamban.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/261/KUM/ tanggal 4 juni tahun 2018 tentang Penetapan Recana Strategis 2017-2022 Kecamatan Tamban, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2017-2022**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Tertib administrasi Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

## 2.2 Perjanjian Kinerja 2019

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Tamban Tahun 2019**

<b>N O</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TAR GET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rupiah)</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	22.200.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	33.550.000

					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	2.500.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembanguna n	19.315.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	22.050.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	9.000.000

2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	80	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	9.620.000
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.062.500

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan 7 (Tujuh) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang pertama pada sasaran strategis survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 80 % dari 16 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Tamban.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 10 (Sepuluh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 124.797.500,-**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tamban

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Tamban telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Tamban Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tamban Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tamban tahun 2019 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	85	104,94
2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	100	97	97

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

**Indikator 1.**

**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ( dalam persentase ) dengan target 81 ternyata realisasinya 85 dengan capaiannya 104,94%**

**Indikator 2.**

**Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 100 % ternyata realisasinya 97 % dengan capaiannya 97 %**

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Kecamatan Tamban**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2019**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	....
= 100	Tercapai/Sesuai target	....
>100	Melebihi target	2

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana kedua indikator mencapai persentase lebih dari 100 % .

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Kecamatan Tamban**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2019**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana satu indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian diatas 100%.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Tamban telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Tamban dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tamban Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamban berdasarkan Keputusan Camat Tamban, Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tamban, dengan ditetapkannya dua ( 2 ) sasaran strategis dengan dua ( 2 ) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator Indeks	Kepuasan Masyarakat
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya administrasi desa	Kualitas Pemerintahan	Indikator Persentase desa dengan admnnistrasi desa yang baik

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	104,94	Melebihi target
2	Sasaran Strategis 2	1	97	Tidak Tercapai

**Tabel 3.2.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	104,94	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Sasaran 2	1	97	-	-	-	-	Baik

**Tabel 3.2.3**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian						
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)		
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	85	1	104,94					
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	100	1	97					

## Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Tamban kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Tamban.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tamban Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ untuk tahun 2019 ditargetkan senilai 81.

Pada tahun 2019 kecamatan Tamban telah melakukan survey kepada 100 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 85 ( Terlampir )

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Tamban tahun 2019 adalah 104,94% ( $[(85/81) \times 100]$ ).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 85 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Tamban tahun 2018 yaitu 81,50 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat naik atau dengan kata lain ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,75%.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 85 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tamban 2018-2022 yang sebesar 81, maka diketahui untuk mendapatkan capaian kinerja hanya 0,75% diakhir Renstra 2022

**Tabel 3.2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tamban Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	81	81	85	104,94	84%	99,10

Keberhasilan Kecamatan Tamban meningkatnya IKM dari target 81 dengan realisasi 85 (104,94%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Tamban. kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor Kecamatan Tamban. Pemerintah Kecamatan Tamban mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Tamban yaitu “ ***Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang \_ Undangan yang berlaku***” yang telah ditanda tangani oleh Camat Tamban untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dalam melayani masyarakat.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tamban tahun 2019 berdasarkan 9 ( Sembilan ) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2.5**  
**Perhitungan Penilaian Responden**  
**Hasil Survey IKM Tahun 2019**  
**( Daftar Terlampir di SKM )**

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan Pelayanan	996	3,26	0,23
2	Prosedur Pelayanan	962	<b>3,63</b>	0,26
3	Ketepatan Waktu Pelayanan	954	3,18	0,23
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	1031	<b>3,08</b>	0,22
5	Standar Layanan	972	3,34	0,24
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	951	3,35	0,24
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	931	3,32	0,23
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	976	3,42	0,24
9	Keadilan Pengguna Pelayanan	956	3,36	0,24
	Jumlah			3,40

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur biaya/tarif dalam pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 3,63 atau 0,26 , sedangkan Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai terendah yaitu 3.08 atau 0,22

**Tabel 3.2.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,94%	94,70	9,3 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :  
Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah di kecamatan Tamban
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :  
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan Penyuluhan KDRT, Gizi dan Ekonomi dan Kesehatan Anak
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :  
Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yang terdiri dari Danramil, Kapolsek , Camat ,Sekretaris, Camat, Kasi Trantib, dan Kepala Desa se Kecamatan Tamban.
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten, melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Tamban ke MTQ Tingkat Kabupaten.
5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah dengan mengikuti Pameran pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang menampilkan Produk unggulan Kecamatan Tamban
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :  
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu melaksanakan kegiatan syukuran Hari Jadi Kecamatan Tamban yang untuk pertama kalinya diadakan dalam kurun 30 Tahun berdirinya Kecamatan Tamban.
7. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan :

Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye social bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMK )yaitu melakukan monitoring pembagian Rastra dan bantuan tunai ke desa-desa

## **Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tamban menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Tamban}} \times 100$$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tamban 2017-2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik”, maka untuk tahun 2019 ditetapkan dengan target 80%, dari hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 16 Desa diwilayah Kecamatan Tamban diketahui terdapat sebanyak 14 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (91%), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 97 % [( 91/80) X100].

Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 91 atau dengan persentase 97% bila dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Tamban tahun 2018, maka diketahui Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik untuk tahun 2019 tidak ada perubahan dari tahun 2018, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 97 [(91/80%)X100%].

**Tabel 3.2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik Kecamatan Tamban Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	100	100	97	97%	100	97

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Tamban dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yang dibantu pihak Kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, Pemerintahan Desa melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BKAD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Tamban, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BAKD)

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tamban tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 9.620.000,00 dan telah terealisasi Rp. 8.430.000,00 (87,63%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,37%.

**Tabel 3.2.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	97	87,63	9,37%

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :

- a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat di Kecamatan untuk membahas rancangan dan peraturan tentang APBdesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala
- b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada di Desa se Kecamatan Tamban.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD yakni :
  1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan Tamban dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing
  2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tamban melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 907.424.690,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 773.724.884,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,27 %.

Komposisi belanja Kecamatan Tamban untuk tahun 2019, sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**  
**Komposisi Belanja Kecamatan Tamban**  
**Tahun Anggaran 2019**  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	585.021.000,00	564.230.870,00	96,45
2	Belanja Tidak Langsung	322.403.690,00	209.494.014,00	64,98
<b>Jumlah</b>		907.424.690,00	773.724.884,00	85,27

Sumber: Laporan Realisasi kinerja, Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Tamban Tahun anggaran 2019 dan Penjabaran LRA Kecamatan Tamban TA. 2019

Dari table diatas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 96,45% terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sebesar 64,98% untuk belanja tidak langsung .

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 124.797.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 117.505.000,- atau 94,16%, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran**  
**Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	115.177.500,-	109.075.000,-	94,70
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	9.620.000,-	8.430.000,-	87,63
	<b>Jumlah</b>	124.797.500,-	117.505.000,-	94,16

*Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.*

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tamban pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3.3**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	104,94	109.075.000,00	94,70
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97	8.430.000,00	87,63

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tamban.

#### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 menunjukkan pencapaian 94,16% yaitu sebanyak 2 sasaran. Banyak sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.3.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**  
**Pada Kecamatan Tamban**  
**Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Jumlah Indikator</b>	<b>% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>	<b>% Realisasi Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	104,94	94,70	9,3
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97	87,63	9,37

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tamban Kabupaten Barito kuala tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tamban yang mana Kecamatan Tamban menetapkan 2 (dua) sasaran dan dan 2 ( dua) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa. Dari 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Tamban pada tahun 2019 mencapai 107 % yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2019 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tamban dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 907.424.690,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 773.724.884,00 atau dengan serapan anggaran 85,27% Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan realisasi anggaran yang kecil dibandingkan dengan target anggaran yang diberikan

## 4.2. Permasalahan – permasalahan Kecamatan Tamban

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tamban secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih belum optimal dalam penyerapan Anggaran yang diberikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pemerintah

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
- b. Mengoptimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang ada.
- c. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Tamban melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang semakin padat.

- 3) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta tepat waktu
- 5) Melakukan rapat koordinasi antara Forkopimcam dan masyarakat

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Tamban.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Tamban tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang.